

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik kecurangan akuntansi dalam organisasi hanya bisa dicegah dan dibasmi apabila ada komitmen tinggi untuk tidak melakukan berbagai bentuk kecurangan dari masing-masing individu pelaku, manajemen maupun pihak lain yang terlibat. Krisis moral pada saat ini memang menjadi masalah utama dan berbagai cara memang bisa ditempuh untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan termasuk dengan mengefektifkan pengendalian internal, penegakan hukum, melaksanakan *good governance*, tetapi jika moral tidak berubah dan sikap komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan segala praktik kecurangan tidak terlaksana maka semua langkah pemberantasan yang ditempuh tidak akan berguna (Putra, 2012).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Puspasari (2012) yang menguji pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan desain penelitian eksperimen pada konteks pemerintahan daerah. Perbedaan penelitian ini terdapat pada beberapa hal. Perbedaan pertama terkait lokasi penelitian yaitu pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2013 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk yang pertamakalinya mendapatkan (*Disclaimer Opinion*) untuk

Kabupaten Indramayu dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat dapat di lihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Opini LKPD Pemerintahan Kabupaten Indramayu TA 2008-2013
BPK RI Perwakilan Jawa Barat

No.	Tahun	Opini
1.	2008	Wajar Dengan Pengecualian
2.	2009	Wajar Dengan Pengecualian
3.	2010	Wajar Dengan Pengecualian
4.	2011	Wajar Dengan Pengecualian
5.	2012	Wajar Dengan Pengecualian
6.	2013	Tidak Memberikan Pendapat

Sumber IHPS BPK RI Semseter 2 TA 2014

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa LKPD Kabupaten Indramayu pada tahun 2013 mendapatkan opini audit Tidak memberikan opini (*Disclaimer Opinion*) opini ini disebabkan salah satunya adalah dikarnakan keuangan dan manajemen RSUD Kabupaten Indramayu tidak berjalan dengan lancar.

Suspendi (2014) menyatakan Beberapa kelemahan yang menyebabkan BPK memberikan opini *Disclaimer Opinion* antara lain: pengelolaan manajemen serta keuangan RSUD Indramayu tidak berjalan dengan baik. Karena manajemen dianggap melakukan perencanaan bisnis tanpa berkoordinasi dengan Pemda, sehingga akhirnya terdapat temuan-temuan dari BPK. Pada kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Indramayu, Nuradi mengatakan, selama proses penilaian laporan keuangan, khususnya terhadap RSUD Indramayu, terdapat kas yang tidak

bisa dipertanggungjawabkan, Kas tersebut berkaitan dengan investasi jangka pendek. Dia menambahkan, seharusnya pihak pengelola rumah sakit mengikuti peraturan berlaku, baik dalam hal tata kelola keuangan, maupun sistem pengendalian intern pemerintah. Menurutnya, selama ini pihak pengelola rumah sakit seolah-olah berjalan sendiri. Dia menjelaskan, meski manajemen RSUD Indramayu dikelola dengan prinsip Badan Usaha Milik Daerah, namun Pemda masih merupakan salah satu pemilik utamanya.

Suspendi (2014) Wakil Bupati Indramayu menyatakan pada wartawan Ekspos Rakyat.net menurutnya, setiap pihak seharusnya mampu mengendalikan diri saat akan mengambil sebuah keputusan, terutama dalam kehidupan berorganisasi. Informasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah belum sepenuhnya memberikan pengaruh signifikan untuk mencegah penyimpangan baik kesalahan ataupun kecurangan.

Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan. Indikasi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Kecenderungan kecurangan akuntansi meliputi berbagai bentuk, seperti tendensi untuk melakukan tindak korupsi, tendensi untuk penyalahgunaan aset, dan tendensi untuk melakukan pelaporan keuangan yang menipu (Soepardi dalam Fauwzi, 2011 : 1).

Menurut Shleifer dan Vishny (1993) serta Gaviria (2001) dalam Puspasari Novita (2012) menyatakan bahwa kecurangan akuntansi ditunjukkan oleh tingkat korupsi suatu negara. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan tahun 2013 menjadi tahun dengan kemarakan kasus korupsi. Setiap tahun *Transparency International* (TI) meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI), sebuah indeks pengukuran tingkat korupsi global. Rentang indeks CPI 2013 adalah 0-100 (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih). Tahun 2013 skor Indonesia adalah 32, pada urutan 114 dari 177 negara yang diukur. Secara regional Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, masih di jajaran bawah apabila dibandingkan skor CPI-nya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi.

Tabel 1.2

Peringkat dan Skor Corruption Perception Index 2013

Peringkat	Negara	Skor
5	Singapura	86
15	Hong Kong	75
36	Taiwan	61
46	Korea Selatan	55
80	China	40
94	Filipina	36
114	Indonesia	32
116	Vietnam	31
119	Timor Leste	30
157	Myanmar	21

Sumber : *Corruption Perception Index*

Menurut Albrecht (2004) dalam Prawira (2014) menyatakan bahwa faktor integritas personal dalam *fraud scale* mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki oleh tiap individu. Beberapa penelitian di bidang etika menggunakan

teori perkembangan moral untuk mengobservasi dasar individu melakukan suatu tindakan. Salah satu yang sering digunakan adalah teori mengenai level penalaran moral Kohlberg. Mengetahui level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan dilema etika, berdasarkan level penalaran moralnya.

Welton (1994) dalam Puspasari (2012) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil penelitian Wilopo (2006) menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akuntansi. Bernardi (1994) dan Ponemon (1993) dalam Moroney (2008) menemukan bahwa semakin tinggi level moral individu akan semakin sensitif terhadap isu-isu etika. Selain faktor rasionalisasi yang berkaitan erat dengan etika, faktor lain yang menjadi penyebab kecurangan akuntansi adalah faktor kesempatan.

Menurut Cressey (1970) dalam Puspasari Novita menyatakan ada tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan akuntansi, yaitu: kesempatan, rasionalisasi, dan dorongan/tekanan. Ketiga faktor tersebut disebut *fraud triangle* (segitiga kecurangan akuntansi). Pada tahun 1980an, Albrecht, seorang doktor akuntansi, mencetuskan *fraud scale* yang berisi tiga faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*, yaitu tekanan situasional (*situasional pressure*), kesempatan untuk melakukan *fraud* dan integritas personal. Studi dari Albrecht ini memperkuat studi Cressey sebelumnya. Albrecht mengganti faktor

rationalization dengan *personal integrity* agar lebih dapat diobservasi. *Personal integrity* mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki individu. *Personal integrity* dapat diobservasi lewat teori perkembangan moral seperti dalam penelitian-penelitian etika.

Kecurangan akuntansi yang terjadi di pemerintahan menyebabkan data dan informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah sangat tidak objektif dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja atau bahkan dalam membuat keputusan. Hal tersebut akan menghambat tercapainya tujuan dari akuntansi pemerintahan, yaitu (a) menjaga keuangan publik dengan mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi dan tindakan untuk mencari keuntungan secara tidak beretika, (b) memfasilitasi pengelolaan keuangan pemerintahan secara sehat, (c) membantu pemerintah dalam memberikan akuntabilitas kepada masyarakat (Wilopo, 2006).

Kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika. Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan ilegal. Menurut Baucus (1994) dalam Hernandez dan Groot (2007), secara umum perilaku ilegal adalah bagian dari perilaku tidak etis, oleh karena itu ada hukum yang harus ditegakkan sebagai bagian dari usaha penegakkan standar moral. Penelitian dari Hernandez dan Groot (2007) menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi. Albrecht (2004) menyatakan bahwa faktor integritas personal dalam *fraud scale* mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki oleh tiap individu.

Moralitas manajemen merupakan tindakan manajemen untuk melakukan hal yang benar dan tidak berkaitan dengan keuntungan atau nilai (Baron, 2006). Kohlberg (1969) menggunakan cerita-cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya dan ia tertarik pada bagaimana orang-orang akan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka bila mereka berada dalam persoalan moral yang sama. Kohlberg (1969) kemudian mengkategorisasi dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam enam tahap yang berbeda. Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan: pra-konvensional, konvensional, dan post-konvensional. Semakin buruk moralitas dari manajemen maka kemungkinan terjadi perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin besar pula. Moral yang buruk dari manajemen diasumsikan dapat mendorong manajemen bertindak tidak etis dan berlaku curang dalam akuntansi.

Berkaitan dengan norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat, undang-undang, dan hukum yang mengatur kehidupan manusia, maka faedah atau fungsi moral adalah agar manusia dapat hidup sesuai dengan norma yang disepakati dalam komunitas kehidupan manusia mau pun hukum dari Tuhan. Menurut Ahmad Amin (1975: 6) berpendapat bahwa faedah mempelajari moral (etika) adalah agar manusia mengetahui tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia, dapat mempengaruhi dan mendorong manusia untuk membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan, kesempurnaan, dan memberi faedah kepada sesama manusia.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Moralitas Individu, dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Seberapa besar pengaruh antara moralitas individu dengan pengendalian internal dalam mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah tentang kecenderungan kecurangan akuntansi dengan mengkaji secara empiris mengenai penerapan fungsi ilmu akuntansi pemerintahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat pengembangan ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi khususnya ilmu akuntansi pemerintahan dengan mengkaji tentang moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.